

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembahasan Teori

1. Upaya Guru PKN

Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) memegang peran sentral dalam menumbuhkan kesadaran siswa terhadap hak dan kewajiban sebagai peserta didik. Hal ini dikarenakan pembelajaran PKN tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga bertujuan menginternalisasikan nilai-nilai kewarganegaraan dalam sikap dan perilaku siswa. Menurut (Mulyana, 2024) dalam kajiannya tentang citizenship education, pembelajaran PKN terbukti membantu siswa memahami hak dan kewajiban sebagai bagian dari nilai kewarganegaraan serta mengembangkan keterampilan aktif berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan berbangsa, termasuk penghormatan terhadap norma dan peraturan yang berlaku.

Upaya yang dilakukan guru PKN dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap hak dan kewajiban salah satunya adalah melalui kegiatan pembelajaran yang memberi pemahaman konseptual serta konteks nyata dari hak dan kewajiban tersebut. Penelitian oleh (Rahayu et al., 2023) menunjukkan bahwa guru PKN meningkatkan kesadaran siswa terhadap hak asasi manusia melalui penyampaian materi yang lengkap dan pembinaan di luar proses pembelajaran formal, seperti pemberian teguran dan nasihat ketika siswa belum menerapkan nilai-nilai hak dalam tindakan nyata di sekolah.

Selain itu, penerapan metode pembelajaran partisipatif dan kontekstual merupakan strategi penting lainnya yang digunakan guru PKN untuk menanamkan kesadaran hak dan kewajiban di kalangan siswa. (Surata et al., 2025) menyatakan bahwa model pembelajaran Discovery Learning dalam Pendidikan Kewarganegaraan terbukti meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa mengenai hak dan kewajiban secara signifikan karena siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran melalui diskusi, eksplorasi, dan refleksi, sehingga pemahaman mereka tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya lain yang tidak kalah penting adalah kolaborasi antara guru PKN dengan pihak sekolah, seperti wali kelas dan guru mata pelajaran lain, guna menciptakan budaya sekolah yang mendukung internalisasi nilai hak dan kewajiban. Pendidikan kewarganegaraan yang efektif akan lebih kuat ketika didukung oleh konsistensi aturan sekolah serta pembiasaan kedisiplinan di berbagai kegiatan sekolah. Implementasi pembelajaran kewarganegaraan yang konsisten mempengaruhi perilaku siswa terhadap hak dan kewajiban, karena lingkungan sekolah yang kondusif memungkinkan siswa untuk menjalankan hak mereka secara benar dan melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab di lingkungan sosialnya (April Setyaningrum, 2026).

Menurut (Gunawan, 2025) kesadaran siswa terhadap hak dan kewajiban sebagai peserta didik merupakan kemampuan internal siswa untuk memahami, menghayati, serta melaksanakan hak yang dimilikinya secara seimbang dengan

kewajiban yang harus dipenuhi dalam kehidupan sekolah. Kesadaran ini tidak muncul secara otomatis, tetapi perlu dibentuk melalui proses pendidikan yang terencana dan berkelanjutan. Oleh karena itu, guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) memiliki peran strategis dalam membimbing, menanamkan nilai, serta membiasakan siswa agar mampu bersikap bertanggung jawab, disiplin, dan menghargai hak orang lain sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Sehubungan dengan hal tersebut, (Gunawan, 2025) mengemukakan bahwa beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap hak dan kewajiban sebagai peserta didik antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan Pembelajaran Kontekstual

Guru PKN mengaitkan materi hak dan kewajiban dengan situasi nyata yang dialami siswa dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah, sehingga siswa memahami bahwa hak dan kewajiban bukan sekadar konsep teoritis, tetapi harus diterapkan dalam praktik nyata.

2. Penanaman Nilai-Nilai Karakter

Guru menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan kepedulian sosial sebagai dasar kesadaran siswa dalam melaksanakan kewajiban serta menghormati hak orang lain.

3. Pembiasaan di Lingkungan Sekolah

Guru membentuk kebiasaan positif melalui kegiatan rutin sekolah yang melatih kedisiplinan, kerja sama, dan tanggung jawab siswa sebagai peserta didik.

Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa upaya guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap hak dan kewajiban sebagai peserta didik dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh dan berkesinambungan, meliputi penerapan pembelajaran kontekstual, penanaman nilai-nilai karakter, pemberian keteladanan, pengawasan dan pembinaan, penerapan reward dan punishment secara adil, pendekatan komunikatif dan dialogis, serta pembiasaan positif di lingkungan sekolah, sehingga kesadaran siswa tidak hanya terbentuk pada tataran pengetahuan, tetapi juga terinternalisasi dalam sikap dan perilaku sehari-hari sebagai wujud tanggung jawab dan penghargaan terhadap hak diri sendiri maupun orang lain.

2. Peran Guru PKN

Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk sikap, karakter, serta kesadaran peserta didik sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan beretika. Peran ini melampaui sekadar penyampaian materi; guru PKN juga menjadi fasilitator pembelajaran, motivator, teladan, pembimbing, dan pembentuk karakter melalui pengalaman pendidikan yang bermakna. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan tidak hanya pada pengetahuan kognitif tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai demokrasi, disiplin,

tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak orang lain dalam kehidupan sekolah dan masyarakat.

Guru PKN berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang aktif dan kontekstual, yaitu menciptakan suasana belajar yang melibatkan siswa secara partisipatif sehingga siswa dapat mengaitkan pengetahuan kewarganegaraan dengan pengalaman nyata mereka. Dalam penelitian kontemporer, guru PKN diidentifikasi sebagai figur sentral dalam menanamkan karakter dan nilai moral kepada siswa melalui aktivitas pembelajaran yang interaktif dan berorientasi pada nilai Pancasila serta keterampilan sosial. Selain itu, guru PKN juga berfungsi sebagai motivator dan pemberi keteladanan. Peran guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menjadi contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai yang diajarkan. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa guru PKN berperan sebagai panutan yang penting dalam pembentukan karakter siswa serta motivasi mereka untuk menjalankan kewajiban dan menghormati hak orang lain (Cahyani & Dewi, 2021).

Peran lain yang signifikan adalah sebagai pembimbing dan pengarah dalam pembentukan nilai karakter siswa, seperti disiplin, integritas, kejujuran, dan kepedulian sosial. Guru memberikan bimbingan secara langsung dan konsisten dalam konteks pengawasan, pembinaan, serta diskusi reflektif untuk membantu siswa memahami tujuan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian terkini menunjukkan bahwa strategi pembelajaran yang melibatkan pemberian penghargaan dan pembinaan yang proporsional membantu

menanamkan kedisiplinan dan nilai moral siswa. Selain itu, guru PKN berperan dalam pengembangan karakter kultural dan sosial siswa melalui integrasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam pembelajaran, sehingga siswa tidak hanya memahami aturan formal, tetapi juga menghormati martabat dan hak orang lain dalam interaksi sosial. Penelitian kontemporer mengamati bahwa peran guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai HAM meningkatkan kesadaran siswa terhadap tanggung jawab sosial dan penghormatan terhadap sesama (Hasanah et al., 2025).

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) memegang peran strategis dalam pembentukan karakter dan kesadaran siswa terhadap hak dan kewajiban melalui keteladanan sikap dan perilaku serta pelaksanaan fungsi sebagai pendidik, motivator, teladan, pembimbing, dan fasilitator, sehingga nilai-nilai kewarganegaraan seperti disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan demokrasi tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga diinternalisasi dan diterapkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah.

3. Hak dan Kewajiban Siswa

a. Hak Siswa

Menurut (Haifarashin et al., 2021) hak dapat diartikan sebagai apa yang dibutuhkan seseorang untuk melindungi kesejahteraannya dan untuk menerima atau melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Ini untuk memungkinkan setiap orang terhubung dengan hak-hak dan secara terbuka mengekspresikan pendapat dan ide mereka sebagai warga negara. Uraian ini

digunakan untuk menegaskan pentingnya dan pembatasan warga negara Indonesia dalam hak kebebasan berekspresi di tempat umum. Hak siswa adalah segala sesuatu yang patut diterima oleh peserta didik dalam proses pendidikan.

Ada beberapa aspek hak siswa yang telah diatur secara formal dalam peraturan perundang-undangan pendidikan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, siswa berhak antara lain:

- 1) Mendapatkan pendidikan yang bermutu, yang mampu mengembangkan potensi intelektual, emosional, dan sosial siswa secara seimbang
- 2) Penilaian yang adil tanpa diskriminasi, sesuai dengan prinsip keadilan dan objektivitas
- 3) Perlindungan dari tindakan kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi, dalam lingkungan sekolah maupun di luar kelas
- 4) Pembinaan dan bimbingan untuk mengembangkan potensi diri, baik melalui kegiatan pembelajaran formal maupun pembiasaan nilai di sekolah.

Pemahaman tentang hak ini sangat penting karena hubungan antara hak dan perilaku siswa dalam kehidupan sekolah menunjukkan bahwa bila siswa memahami haknya, seperti hak atas pendidikan dan partisipasi, mereka lebih mampu berperan aktif dalam kegiatan belajar serta menjaga hubungan

harmonis di lingkungan sekolah. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman hak dan kewajiban siswa berkorelasi positif dengan kedisiplinan dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Misalnya, siswa yang memahami haknya cenderung lebih disiplin dan bertindak secara bertanggung jawab sebagai bagian dari komunitas sekolah (Utomo et al., 2023).

b. Kewajiban Siswa

Menurut (Hamzah et al., 2022) kewajiban pada dasarnya merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh setiap individu dalam menjalankan perannya sebagai warga sekolah, agar ia memperoleh hak-hak yang sejalan dengan pelaksanaan kewajibannya. Kewajiban siswa merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan dalam kegiatan belajar, seperti:

- 1) Mengikuti proses pembelajaran dengan tertib dan disiplin, yaitu hadir tepat waktu, aktif dalam kegiatan belajar, dan menyelesaikan tugas akademik;
- 2) Menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan sekolah, sebagai bagian dari sikap tanggung jawab sosial;
- 3) Mematuhi tata tertib sekolah, yang mencakup aturan tertulis maupun norma perilaku yang berlaku;
- 4) Menghormati guru, tenaga kependidikan, dan teman, sebagai manifestasi penghargaan terhadap martabat dan hak sesama anggota sekolah.

Pemahaman yang baik tentang kewajiban siswa menjadi modal penting dalam membentuk lingkungan pendidikan yang kondusif, tertib, dan saling

menghormati. Penelitian empiris menunjukkan bahwa implementasi materi hak dan kewajiban dalam pembelajaran PKN, terutama melalui pendekatan yang aktif, dapat meningkatkan kedisiplinan siswa secara signifikan. Hal ini menegaskan bahwa pemahaman kewajiban siswa tidak hanya bersifat normatif, tetapi berdampak nyata terhadap perilaku siswa di sekolah.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban siswa merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam proses pendidikan, di mana siswa berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, penilaian yang adil, perlindungan, serta pembinaan untuk pengembangan potensi diri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun pada saat yang sama siswa juga memiliki kewajiban untuk bersikap disiplin, mematuhi tata tertib, menjaga lingkungan sekolah, serta menghormati warga sekolah lainnya, sehingga keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban menjadi dasar terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, tertib, dan kondusif serta mencerminkan kedewasaan dan tanggung jawab siswa sebagai warga sekolah.

4. Kesadaran Hak dan Kewajiban Siswa

a. Kesadaran

Kesadaran merupakan aspek penting dalam pembentukan sikap dan perilaku individu dalam kehidupan sosial, termasuk di lingkungan pendidikan. Menurut (Fadilah et al., 2024) , kesadaran adalah kemampuan seseorang untuk memahami, merasakan, dan melaksanakan sesuatu tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Kesadaran tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga berkaitan dengan internalisasi

nilai dan sikap yang tertanam dalam diri seseorang sehingga memengaruhi cara berpikir dan bertindak secara bertanggung jawab.

Dalam konteks pendidikan, kesadaran hak dan kewajiban siswa menunjukkan sejauh mana siswa mampu memahami posisi dan perannya sebagai peserta didik sekaligus sebagai bagian dari warga sekolah. Kesadaran ini mencerminkan keseimbangan antara pemahaman terhadap hak yang patut diperoleh dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara sadar. Penelitian Rahmadewi et al. (2022) menyebutkan bahwa kesadaran hak dan kewajiban siswa berpengaruh terhadap terbentuknya sikap disiplin, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan sekolah, sehingga menciptakan iklim belajar yang kondusif.

Kesadaran hak dan kewajiban siswa dapat dilihat melalui beberapa indikator berikut:

- 1) Pemahaman terhadap aturan sekolah, yaitu kemampuan siswa memahami tujuan dan makna tata tertib sebagai pedoman dalam berperilaku.
- 2) Disiplin dalam mengikuti kegiatan belajar, yang tercermin dari kehadiran tepat waktu, ketaatan terhadap proses pembelajaran, serta kesungguhan dalam belajar.
- 3) Berperilaku sesuai norma dan tata tertib, baik dalam interaksi dengan guru, teman, maupun warga sekolah lainnya.
- 4) Bertanggung jawab terhadap tugas dan peran, termasuk menyelesaikan tugas akademik serta menjalankan kewajiban sebagai peserta didik.

5. Mengajukan atau menuntut hak dengan cara yang sopan dan benar, yaitu menyampaikan pendapat, keberatan, atau kebutuhan secara etis, santun, dan sesuai prosedur.

Sejalan dengan hal tersebut, (Magdalena et al., 2024) menegaskan bahwa kesadaran siswa terhadap hak dan kewajiban tidak muncul secara instan, tetapi terbentuk melalui proses pembelajaran, pembiasaan, serta keteladanan di lingkungan sekolah. Siswa yang memiliki kesadaran tinggi cenderung mampu mengontrol perilakunya, menghormati hak orang lain, serta menjalankan kewajibannya tanpa harus diawasi secara ketat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hak dan kewajiban siswa merupakan kemampuan yang tumbuh dari pemahaman dan penghayatan nilai-nilai yang terinternalisasi dalam diri siswa, sehingga mendorong mereka untuk melaksanakan kewajiban dan menuntut hak secara sadar tanpa paksaan. Kesadaran tersebut tercermin melalui pemahaman terhadap aturan sekolah, kedisiplinan dalam kegiatan belajar, perilaku yang sesuai dengan norma dan tata tertib, tanggung jawab terhadap tugas dan peran, serta kemampuan menyampaikan hak dengan cara yang sopan, benar, dan bertanggung jawab. Kesadaran inilah yang menjadi dasar terbentuknya karakter siswa yang dewasa, disiplin, dan beretika sebagai warga sekolah.

b. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pembentukan Kesadaran Siswa

Pembentukan kesadaran siswa terhadap hak dan kewajiban dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari dalam diri siswa maupun dari lingkungan sekitarnya. Faktor tersebut dapat menjadi pendukung apabila memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan sikap dan perilaku siswa, tetapi dapat pula menjadi penghambat apabila memberikan pengaruh yang kurang mendukung terhadap proses pembentukan kesadaran.

1) Faktor pendukung

Faktor pendukung merupakan berbagai kondisi yang membantu siswa dalam memahami dan melaksanakan hak serta kewajibannya sebagai peserta didik. Faktor tersebut dapat berasal dari lingkungan sekolah, keluarga, maupun dari dalam diri siswa. Lingkungan sekolah yang kondusif merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung pembentukan kesadaran siswa. Lingkungan sekolah yang memberikan keteladanan, pembiasaan, pengawasan, dan pembinaan dapat membantu siswa memahami perilaku yang sesuai dengan aturan sekolah. (Zahroty et al., 2026) melalui penelitian kualitatif mengenai peran guru dalam membentuk karakter disiplin siswa, menemukan bahwa faktor pendukung pembentukan karakter disiplin meliputi lingkungan sekolah yang kondusif, keteladanan guru, keterlibatan orang tua dan guru, serta kesadaran diri siswa.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan kesadaran siswa tidak hanya bergantung pada kemampuan siswa secara pribadi, tetapi juga membutuhkan lingkungan pendidikan yang memberikan contoh dan pembiasaan

secara konsisten. Dalam konteks sekolah, guru memiliki peran penting karena perilaku guru dapat menjadi contoh yang diamati dan ditiru oleh siswa.

Selain lingkungan sekolah, pembiasaan juga menjadi faktor yang mendukung pembentukan kesadaran siswa. Pembiasaan melalui kegiatan rutin seperti datang tepat waktu, mengikuti pembelajaran, melaksanakan piket, menjaga kebersihan, mengikuti upacara, dan menaati tata tertib memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam menjalankan kewajibannya. (Zahroty et al., 2026) juga menunjukkan bahwa pembiasaan mengatur waktu menjadi bagian dari peran guru dalam membentuk karakter disiplin siswa.

Faktor pendukung berikutnya adalah dukungan keluarga dan orang tua. Keterlibatan orang tua dapat memperkuat pembinaan yang dilakukan sekolah karena siswa memperoleh arahan dan pengawasan tidak hanya ketika berada di lingkungan sekolah, tetapi juga ketika berada di rumah. (Yanti & Marimin, 2017) menemukan bahwa motivasi, lingkungan keluarga, dan teman sebaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kedisiplinan siswa. Ketiga faktor tersebut secara simultan memberikan pengaruh sebesar 68,7% terhadap kedisiplinan siswa yang diteliti.

Selain itu, motivasi dan kesadaran diri siswa juga merupakan faktor penting. Siswa yang memiliki motivasi dan kesadaran diri akan lebih mudah menerima arahan serta berusaha melaksanakan kewajibannya tanpa harus selalu mendapatkan pengawasan dari guru. Dengan demikian, pembentukan kesadaran

siswa membutuhkan dukungan dari lingkungan sekaligus kemauan yang berasal dari dalam diri siswa.

Berdasarkan uraian tersebut, faktor pendukung dalam pembentukan kesadaran siswa meliputi lingkungan sekolah yang kondusif, keteladanan guru, pembiasaan, dukungan orang tua, kerja sama antarpihak sekolah, motivasi, serta kesadaran diri siswa.

2) Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung, terdapat pula berbagai faktor yang dapat menghambat pembentukan kesadaran siswa mengenai hak dan kewajiban. Faktor penghambat dapat berasal dari dalam diri siswa maupun dari lingkungan sosial yang memengaruhi perilaku siswa.

Salah satu faktor penghambat adalah kurangnya kesadaran diri siswa. Kondisi tersebut dapat terlihat ketika siswa sebenarnya telah mengetahui aturan dan kewajibannya, tetapi belum mampu menerapkannya secara konsisten. Misalnya, siswa mengetahui bahwa datang tepat waktu merupakan kewajiban, tetapi masih terlambat masuk sekolah atau kelas.

Kurangnya motivasi juga dapat menjadi hambatan dalam pembentukan kesadaran siswa. Siswa yang kurang memiliki motivasi cenderung kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dan kurang memperhatikan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. (Yanti & Marimin, 2017) menunjukkan bahwa motivasi memiliki pengaruh terhadap kedisiplinan siswa. Temuan tersebut

memperlihatkan bahwa motivasi merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan perilaku disiplin siswa.

Faktor lain yang dapat menjadi hambatan adalah pengaruh teman sebaya. Lingkungan pergaulan dapat memengaruhi perilaku siswa karena siswa berinteraksi secara intensif dengan teman-temannya. Penelitian (Pega & Suhaili, 2025) menemukan adanya hubungan yang signifikan antara konformitas teman sebaya dan kedisiplinan siswa dalam menaati tata tertib sekolah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa lingkungan pertemanan dapat berkaitan dengan perilaku siswa dalam mematuhi aturan sekolah.

Penelitian (Chasanah et al., 2026) juga menunjukkan adanya hubungan antara sosialisasi teman sebaya dan tingkat kedisiplinan siswa SMA. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa lingkungan teman sebaya dapat memengaruhi perilaku siswa melalui proses interaksi dan peniruan perilaku.

Selain teman sebaya, lingkungan keluarga juga dapat menjadi faktor yang memengaruhi perilaku siswa. Kurangnya perhatian, pengawasan, atau keterlibatan orang tua dapat menyebabkan pembinaan yang dilakukan sekolah tidak selalu mendapatkan penguatan di lingkungan rumah. (Zahroty et al., 2026) juga menemukan bahwa minimnya peran orang tua menjadi salah satu faktor penghambat dalam pembentukan karakter disiplin siswa.

Berdasarkan uraian tersebut, faktor penghambat dalam pembentukan kesadaran siswa dapat berupa rendahnya kesadaran diri, kurangnya motivasi, kurangnya kedisiplinan, pengaruh teman sebaya, serta kurang optimalnya

dukungan dan pengawasan dari lingkungan keluarga. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan siswa mengetahui hak dan kewajibannya secara pengetahuan, tetapi belum mampu menerapkannya secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

c. Upaya Meningkatkan Kesadaran Siswa terhadap Hak dan Kewajiban

Peningkatan kesadaran siswa terhadap hak dan kewajiban merupakan proses yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Kesadaran tidak cukup dibentuk melalui pemberian pengetahuan mengenai pengertian hak dan kewajiban, tetapi perlu diperkuat melalui pembelajaran, penanaman nilai karakter, pembiasaan, keteladanan, pembinaan, dan pengawasan.

Menurut Gunawan (2025), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peran dalam membentuk peserta didik agar memahami nilai-nilai Pancasila dan mampu menerapkannya dalam kehidupan. Dalam lingkungan sekolah, nilai tersebut dapat diwujudkan melalui sikap disiplin, tanggung jawab, menghormati orang lain, menaati aturan, serta melaksanakan kewajiban sebagai peserta didik.

Berdasarkan pandangan tersebut, salah satu upaya yang dapat dilakukan guru PKN adalah pendekatan pembelajaran kontekstual. Guru menghubungkan materi hak dan kewajiban dengan situasi nyata yang dialami siswa dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Melalui pendekatan tersebut, siswa dapat memahami bahwa hak dan kewajiban bukan hanya konsep yang dipelajari di dalam kelas, tetapi merupakan bagian dari perilaku yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya berikutnya adalah penanaman nilai-nilai karakter. Guru dapat menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, kejujuran, kepedulian, dan sikap menghargai orang lain melalui pembelajaran maupun keteladanan. Penanaman nilai tersebut diperlukan agar siswa tidak hanya mengetahui perilaku yang baik, tetapi juga mampu menjadikannya sebagai bagian dari kebiasaan dalam kehidupan sekolah.

Selanjutnya, pembiasaan di lingkungan sekolah dapat digunakan untuk memperkuat kesadaran siswa. Pembiasaan dapat dilakukan melalui kegiatan rutin seperti datang tepat waktu, mengikuti pembelajaran dengan tertib, mengerjakan tugas, melaksanakan piket, menjaga kebersihan, mengikuti upacara, dan menaati tata tertib sekolah. Zahroty et al. (2026) menunjukkan bahwa pembiasaan mengatur waktu merupakan salah satu bentuk peran guru dalam membentuk karakter disiplin siswa. Dalam pelaksanaannya, guru juga dapat memberikan arahan, motivasi, nasihat, dan teguran kepada siswa yang belum menjalankan kewajibannya dengan baik. Pemberian teguran tidak semata-mata ditujukan sebagai hukuman, tetapi dapat menjadi bagian dari proses pembinaan agar siswa memahami kesalahannya dan berusaha memperbaiki perilakunya.

Apabila permasalahan siswa tidak dapat diselesaikan melalui pembelajaran atau pembinaan langsung oleh guru, diperlukan kerja sama dengan guru BK, wali kelas, pihak sekolah, dan orang tua. Kerja sama tersebut diperlukan agar pembinaan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Penelitian (Pega & Suhaili, 2025) juga menunjukkan bahwa layanan bimbingan dan

konseling dapat digunakan untuk membantu meningkatkan kedisiplinan siswa dan mengembangkan kemampuan sosial siswa.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya meningkatkan kesadaran siswa terhadap hak dan kewajiban dilakukan meliputi pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, penanaman nilai karakter, pembiasaan, keteladanan, pemberian arahan dan motivasi, serta pembinaan dan pengawasan. Berbagai upaya tersebut diperlukan agar pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban dapat diwujudkan dalam perilaku yang nyata dan konsisten sebagai peserta didik.

5. Pendidikan Kewarganegaraan (PKN)

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian penting dari keseluruhan sistem pendidikan nasional. Karena itu, mata pelajaran ini dimasukkan ke dalam kurikulum dan diajarkan di setiap jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Peran dan fungsi Pendidikan Kewarganegaraan diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Agar mata pelajaran atau mata kuliah PKN dapat dipahami dengan baik, maka proses perancangannya, pengembangannya, pelaksanaannya, hingga evaluasinya harus disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional. Hal tersebut menjadi dasar dan kerangka berpikir dalam pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan (Zulfikar & Dewi, 2021).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) merupakan mata pelajaran yang memegang peranan penting dalam sistem pendidikan nasional karena berfungsi sebagai wadah pembentukan warga negara yang bertanggung jawab, demokratis, dan berkarakter. Mempelajari PKN tidak sekadar memahami teks undang-undang atau teori politik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan demokrasi yang mendasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara (Parawangsa et al., 2021).

Secara umum, tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pembentukan *civic competence*, yaitu kemampuan siswa untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, berpikir kritis, serta bertindak secara etis dan bertanggung jawab dalam masyarakat demokratis. Pendidikan ini dirancang agar peserta didik tidak hanya menjadi objek pendidikan, tetapi juga subjek aktif yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik secara logis dan inklusif (Pebriani et al., 2021).

Menurut (Fitriani & Dewi, 2021) dijelaskan bahwa mata pelajaran PKN merupakan program pendidikan yang berfokus pada nilai-nilai demokrasi politik, yang diperkaya dengan berbagai sumber pengetahuan lain serta pengaruh positif dari lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga. Semua unsur tersebut diolah untuk melatih siswa berpikir kritis dan analitis, serta membentuk sikap dan tindakan yang demokratis sebagai persiapan hidup berdemokrasi sesuai Pancasila dan UUD 1945. Mata pelajaran PKN mencakup persiapan sebagai peserta didik

yang memiliki peran serta dan tanggung jawab sebagai warga negara aktif. Proses ini melibatkan peran sekolah, metode pengajaran dan pembelajaran, pendidikan, serta kreativitas sebagai bagian integral dari peserta didik yang aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan positif. Semua ini didukung oleh model pembelajaran yang bertujuan menciptakan lingkungan yang mempromosikan perdamaian (Istianah et al., 2024).

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) merupakan mata pelajaran strategis dalam sistem pendidikan nasional yang dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional melalui penanaman nilai-nilai demokrasi, Pancasila, dan UUD 1945, serta pengembangan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan partisipatif, sehingga mampu membentuk peserta didik yang berkarakter, bertanggung jawab, dan siap berperan aktif sebagai warga negara yang demokratis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Untuk memperkuat landasan teori dan memberikan gambaran tentang penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, bagian ini menyajikan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan topik upaya guru PKN dalam meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban siswa. Penelitian-penelitian terdahulu ini menjadi acuan penting dalam melihat keterkaitan antara peran guru PKN, proses

pembelajaran, serta dampaknya terhadap pembentukan karakter dan kedisiplinan siswa.

Pada penelitian(Adiyaksa & Sugiyanto, 2024) di SMK Informatika Ciputat, guru PKN terlibat langsung dalam menangani masalah ketidakdisiplinan siswa dengan mengembangkan pendidikan karakter moral, memberi pengarahan, dan menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan bertindak. Selain itu, dalam konteks transformasi nilai HAM, penelitian (Safitri et al., 2024) di SMA Negeri 5 Medan menemukan bahwa guru PKN efektif mentransformasikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia ke dalam pembelajaran. Mereka mengaitkan materi HAM dengan hak dan kewajiban siswa, dan melalui dialog serta refleksi, siswa menunjukkan peningkatan kesadaran HAM yang diwujudkan dalam sikap hormat, tanggung jawab, dan kedisiplinan.

Metode pembelajaran yang kreatif juga memiliki peran signifikan. Sebuah studi di Madrasah Aliyah Sabilal Akhyar menggunakan model role-playing dalam pembelajaran PKN, dan hasilnya menunjukkan bahwa cara ini efektif membentuk karakter siswa kelas XI, seperti rasa empati, tanggung jawab, dan pemahaman terhadap norma sosial dan kewarganegaraan(Lubis & Sembiring, 2020). Lebih jauh lagi, penelitian oleh (Sunanto & Pujilestari, 2024) dalam konteks SMK menunjukkan bahwa guru PKN/PKN memainkan peran sentral sebagai pembimbing, teladan, dan fasilitator dalam menanamkan sikap disiplin dan tanggung jawab yang berkaitan langsung dengan pemahaman hak dan kewajiban siswa. Sebagai contoh, studi kasus di SMK TI PGRI 11 Serpong menemukan

bahwa guru PKN berperan aktif dalam pencegahan kenakalan dan pembentukan karakter melalui pendekatan pembimbingan, keteladanan, dan komunikasi yang persuasif, sehingga perilaku yang mencerminkan kesadaran atas hak dan kewajiban semakin meningkat.

Dengan demikian, berbagai penelitian ini menunjukkan bahwa guru PKN memiliki peran besar dalam membentuk kesadaran siswa terhadap hak dan kewajiban melalui pembelajaran, keteladanan, pembiasaan, serta pembinaan karakter. Temuan ini mendukung fokus penelitian di SMK N 3 Bengkulu Selatan.

C. Rangkuman Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa:

1. PKN merupakan mata pelajaran yang berperan penting dalam membentuk karakter dan kesadaran siswa mengenai hak dan kewajiban.
2. Hak dan kewajiban siswa harus dipahami sebagai bagian integral dari kehidupan sekolah yang harmonis.
3. Kesadaran hak dan kewajiban muncul melalui pemahaman, pembiasaan, dan pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus.
4. Guru PKN berperan sebagai pendidik, pembimbing, fasilitator, dan teladan yang mampu mempengaruhi perilaku siswa.
5. Upaya guru PKN meliputi keteladanan, pembelajaran kontekstual, pola pembiasaan, reward dan punishment, serta komunikasi yang persuasif.

6. Penelitian terdahulu mendukung bahwa strategi guru PKN efektif dalam meningkatkan disiplin, tanggung jawab, dan kesadaran siswa terkait hak dan kewajiban.

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Kerangka berpikir diatas menjelaskan bahwa rendahnya kesadaran siswa tentang hak dan kewajiban diatasi melalui upaya guru PKN seperti pembelajaran aktif, penerapan aturan, serta penghargaan dan konsekuensi. Guru berperan sebagai fasilitator dan teladan. Hasil yang diharapkan adalah siswa menjadi lebih sadar hak dan kewajiban, disiplin, dan bertanggung jawab.